



# BAGIAN I

## EVALUASI DAN PROSPEK EKONOMI RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak menginkan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



# BERJALAN MENITI BUIH

(Renungan Sosial Ekonomi 45 Tahun Provinsi Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

<https://ejournal.uns.ac.id>  
Tanggal 9 Agustus 1957 merupakan tonggak sejarah pertama lahirnya Provinsi Riau. Ini berarti usianya telah memasuki 45 tahun dan cukup dewasa jika dibandingkan dengan usia manusia. Dalam usia itu Riau ternyata dihadapkan pada dilemma kekinian yang pada dasarnya bisa menjadi sumber bencana. Kita yang kini malang melintang di Riau; apakah itu menjadi pemimpin, menjadi politisi, atau menjadi cendekiawan, atau bahkan menjadi rakyat, pemuda dan lain sebagainya perlu menengok sekejap pada persoalan sosial ekonomi Riau terbaru yang berkembang.

Berdasarkan data statistik yang disampaikan BPS Riau pada acara Pra-Forum Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2002, terungkap beberapa data yang bila dicermati cukup mencengangkan. Ternyata dalam dua tahun terakhir sempena diimplementasikannya otonomi daerah dan dimulainya era desentralisasi fiskal



jumlah penduduk miskin Riau hanya menurun relatif kecil. Pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin Riau adalah sebesar 10,38% dari total penduduk. Sedangkan tahun 2001 berkurang menjadi 10,06%. Ini berarti Riau hanya mampu mereduksi penduduk miskinnya sebesar 3,1%.

Diamati di setiap kabupaten ternyata hanya enam kabupaten yang jumlah penduduk miskinnya mengalami penurunan. Sedangkan sembilan lainnya malah mengalami peningkatan yang cukup spektakuler. Kabupaten yang mengalami kenaikan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Kuantan Singingi. Pada tahun 2000 di Kuansing persentase penduduk miskinnya hanya 1,70% tetapi pada tahun 2001 naik menjadi 11,66%. Ini berarti sejak berpisah dengan Indragiri Hulu terjadi lonjakan persentase penduduk miskin mencapai 584,12%. Inhu sendiri sebagai kabupaten induk justru mampu mengurangi persentase penduduk miskinnya dari sebesar 13,97% pada tahun 2000 menjadi hanya 8,54% pada tahun 2001, atau 38,87%.

Hal yang sama juga dialami oleh Kabupaten Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Memilukan sekali bila semua daerah bekas Kampar yang dimekarkan ini jumlah penduduk miskinnya menjadi bertambah. Kampar sebagai kabupaten induk pada tahun 2000 persentase penduduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





misalnya hanya 5,49% sedangkan tahun 2001 naik menjadi 14,48% (meningkat 163,75%). Pelawan sebagai kabupaten pemekaran pada tahun 2000 persentase penduduk miskinnya hanya 7,70% tetapi pada tahun 2001 membengkak menjadi 19,49% (meningkat 153,12%). Sedangkan Rokan Hulu pada tahun 2000 persentase penduduk miskinnya hanya 9,44% dan tahun 2001 naik menjadi 17,23% (meningkat 82,52%).

Pecahan Kampar lainnya adalah Rokan Hilir yang mengalami peningkatan persentase penduduk miskin mencapai 18,67%. Pada tahun 2000 persentase penduduk miskinnya 14,94% sedangkan tahun 2001 naik menjadi 17,23%. Beberapa kabupaten lain yang meningkat persentase penduduk miskinnya adalah Kepulauan Riau, yakni sebesar 2,85% pada tahun 2000 naik menjadi 3,85% pada tahun 2001 (meningkat 35,09%), Kabupaten Natuna dari 9,91% pada tahun 2000 naik menjadi 12,36% tahun 2001 (meningkat 24,62%), Kota Batam pada tahun 2000 hanya 1,60% pada tahun 2001 naik menjadi 2,06% (meningkat 24,10%).

Sementara Kota Dumai pada tahun 2000 sebesar 11,51% pada tahun 2001 naik menjadi 14,41% (meningkat sebesar 24,33%). Bila diamati wilayah kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2001 maka



Pelawaran menempati urutan teratas, yakni 19,49%, diikuti oleh Rokan Hilir sebesar 17,73%, Rokan Hulu 17,23%, Kampar 14,48%, Dumai 14,36%, Bengkalis 13,96%, Natuna 12,36%, dan Kuantan Singingi 11,63%.

Kabupaten yang mampu mengurangi jumlah penduduk miskinnya antara lain adalah Karimun menurun dari 19,72% tahun 2000 menjadi hanya 8,67% tahun 2001, Siak dari 9,31% tahun 2000 menjadi hanya 5,01% pada tahun 2001, Bengkalis dari 25,36% menjadi 13,96%, dan Indragiri Hulu dari 13,97% menjadi 8,54% serta Indragiri Hilir dari 9,20% menjadi 7,96%. Sedangkan Kota Pekanbaru dari 7,10% tahun 2000 turun menjadi 5,82% pada tahun 2001.

Terlepas dari akurasi data yang dilansir BPS Riau tersebut valid atau tidaknya, cerminan Riau saat ini seperti gambaran di atas tentunya membuat bulu kuduk kita menjadi berdiri. Pemekaran kabupaten ternyata belum memberi dampak positif bagi masyarakat kita secara umum. Tidaklah mereka menjadi tambah sejahtera dan bahkan disinyalir aparat pemerintah dan para anggota dewanlah yang menikmati berkahnya. Ditambah lagi dengan uang yang kian berlimpah yang ada di seluruh Riau bukannya makin membuat rakyat Riau menjadi makin sejahtera.



Otonomi daerah ternyata masih belum bergeser pada tingkat masyarakat dalam hal menghadapi tantangan global saat ini. Transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah ternyata belum mampu “mengungkit batang terendam” Riau. Pada tahun 2002 ini diperkirakan uang yang disediakan untuk Riau akan mencapai Rp 8,36 trilyun yang terdiri dari Rp 4,912 trilyun untuk keperluan pengeluaran pembangunan dan Rp 3,123 trilyun untuk keperluan pengeluaran rutin. Jika uang tersebut merupakan pecahan seribu rupiah lalu disambung-sambung satu sama lain mungkin sudah mampu menutup seluruh wilayah Riau ini. Artinya, ketika Riau bergelimang uang mengapa justru kemiskinan rakyat yang meningkat?!

Bila diamati dari aspek pertumbuhan ekonomi, maka Riau justru lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi nasional hanya 3,3% sedangkan Riau mampu tumbuh sebesar 5,05%. Ini menguatkan dugaan bahwa yang menikmati Riau ini masih belum lagi masyarakatnya tetapi justru pihak-pihak tertentu yang mampu mengail di air keruh. Anehnya lagi menurut BPS Riau pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Riau akan melambat sehingga diperkirakan hanya akan tumbuh 5%. Hal ini disebabkan oleh turunnya secara berarti nilai tambah sektor perbankan. Kea-

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





data tersebut semakin menguatkan hipotesis kita bahwa kemampuan kita memanfaatkan sumber keuangan yang mulai berlimpah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat masih sangat lemah.

Pada satu sisi pertumbuhan penduduk Riau mengalami peningkatan yang paling tinggi secara nasional. Bila pertumbuhan penduduk nasional hanya mencapai 1,4%, Riau justru mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 3,8%. Angka ini lebih dominan disebabkan oleh migrasi, bukan oleh angka kelahiran. Artinya Riau sedang diserbu penduduk pendatang. Tentunya untuk memanfaatkan bakat yang tadinya kian membesar dan selanjutnya dialirkan ke daerahnya. Rakyat Riau masih saja tetap menjadi penonton yang setia dan seringkali berseteru mendiskusikan permainan yang sedang berlangsung dan saling mencaci maki para pemainnya. Padahal pemain itu sendiri sedang menikmati keasyikannya dalam bermain dan bahkan menikmati untung yang sangat besar menjadi pemain. Menjadi penonton memang selalu jauh lebih pandai dari pemain dan memang tidak jarang ketika pemain hanya adem-adem saja, justru penontonlah yang baku hantam satu sama lain.

Dari sekarang, mumpung belum terlambat, perlu kiranya ada kesadaran hakiki dari segenap komponen masyarakat Riau untuk membalikkan





keadilan. Kita harus berpacu dalam kearifan dan kebersamaan, bukannya berseteru untuk menuai kezaliman. Marwah Melayu tidaklah akan mampu bertahan hanya dengan kefasihan kita mengucapkan slogan “Tak Melayu Hilang di Bumi”. Lebih penting dari itu adalah kerja keras dan kearifan kita mengentaskan anak jati Melayu ini dari kemiskinan supaya mereka memang mampu “*Berjalan meniti buih dan berenang sampai ke tepian*”. Bukan hanya menggapai mimpi yang tak kunjung jadi kenyataan. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



# MENGGANTANG ASAP DALAM HIMPITAN

(Evaluasi Ekonomi Indonesia Memasuki Tahun 2003)

Perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2002 telah mengalami pasang surut yang berarti. Ditandai oleh beberapa indikator makro pergerakan ekonomi Indonesia seakan mulai menampakkan titik cerah. Ada geliat di beberapa sektor, namun pada satu sisi lainnya berbagai masalah masih menghimpit. Pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat pada kuartal ketiga tahun 2002 merupakan momentum yang bagus bagi Bergeraknya dinamika ekonomi Indonesia. Pada kurun waktu tersebut ekonomi Indonesia ternyata mampu tumbuh sebesar 3,92%. Hal ini sejalan dengan makin membaiknya perkembangan ekonomi global sehingga pada tahun 2003 ada titik cerah yang dapat diharapkan.

Indikator perbaikan makro ekonomi ditandai pula oleh turunnya suku bunga SBI dari 17,50% menjadi 13,04% dan pada bulan-bulan awal tahun 2003 Bank Indonesia akan berupaya menurunkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



kannya sampai di bawah 10%. Ini akan mengakibatkan turunnya suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman. Pada akhirnya akan menyebabkan terbukanya kesempatan untuk berinvestasi di sektor riil karena para pengusaha mulai berani memanfaatkan dana bank untuk berbisnis. Pemilik modal juga akan lebih melirik pasar modal ketimbang menempatkan dananya di bank. Ini merupakan salah satu pemicu bagi bergairahnya perekonomian. Para konsumen juga akan menggunakan kesempatan ini untuk membelanjakan uangnya, baik akibat adanya dana murah yang tersedia dari kredit-kredit konsumsi yang ditawarkan perbankan maupun dari dana mereka sendiri yang selama ini mengendap di bank. Permintaan domestik akan naik yang dapat memacu kembali produksi dalam negeri dan membuka peluang kerja.

Perkembangan ekspor Indonesia memberikan cerminan pula bagi membaiknya pasar global bagi produk-produk lokal. Pada kuartal keempat tahun 2002 ekspor Indonesia telah mencapai 5,3 miliar dolar AS yang merupakan angka tertinggi pada tahun 2002. Bila perkembangan ekspor terus membaik maka kesempatan untuk memanfaatkan pasar Internasional dapat menopang perkembangan ekonomi secara lebih baik. Peluang untuk itu terbuka lebar sejalan dengan membaiknya perekonomian berbagai negara Asia, khususnya ASEAN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Indikator lain adalah membaiknya kinerja mata uang rupiah. Sepanjang tahun 2002 rupiah tercatat sebagai *Best Performing Asian Currency* yang diukur dari margin penguatan nilai tukarnya terhadap dollar AS. Hingga saat ini rupiah telah mengalami apresiasi mencapai 17%. Sedangkan mata uang China justru terdepresiasi -15,8%, Singapura -11,3%, dan Malaysia -8,8%. Hanya saja Thailand memang lebih baik yakni terapresiasi mencapai 22,7%.

Dari sisi keuangan negara hal yang cukup mendukung optimisme ekonomi pada tahun 2003 adalah adanya penurunan rasio hutang. Dalam tempo satu hingga satu setengah tahun terakhir *Debt to Ratio* terhadap PDB berhasil ditekan dari 100% di tahun 2001 menjadi 71,79% pada tahun 2002. Keadaan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja ekonomi makro Indonesia.

Beberapa masalah yang mungkin menjadi pengganjal perbaikan kinerja ekonomi Indonesia tahun 2003 adalah terkait dengan isu-isu keamanan. Tragedi Bom Bali jelas menimbulkan dampak ekonomi yang tidak sedikit. Hal ini telah menyebabkan adanya perlambatan dalam pergerakan ekonomi, khususnya investasi. Sektor pariwisata mengalami guncangan yang sangat hebat. Derivasi dari sektor ini sangat lebar sehingga implikasinya terhadap perkembangan sektor lain cukup terasa,





seperti transportasi, perhotelan, dan restoran. Pendalaman dari implikasinya adalah pada faktor-faktor produksi dari *leading sector* tersebut. Imbasnya pada penurunan pendapatan dan daya beli domestik pada akhirnya memperlambat kemajuan dan perkembangan ekonomi.

Keberhasilan pemerintah meringkus berbagai pelaku pemboman dan secara transparan mengadilinya akan mampu memulihkan kembali kepercayaan asing terhadap Indonesia. Ditopang oleh keberhasilan perjanjian perdamaian dengan pihak GAM di Aceh maka titik pangkal membangun kepercayaan investor dapat mulai dan digerakkan menuju terciptanya suasana yang kondusif untuk melakukan investasi di Indonesia. Tanpa memperhatikan faktor kepastian hukum dan keamanan negara secara serius maka *risk country* Indonesia tetap akan tinggi dan kemampuan untuk menarik investasi asing tidak akan pernah terealisasi. Biaya yang dikorbankan untuk itu akan sia-sia belaka.

Beberapa kebijakan lain yang perlu secara hati-hati diterapkan di Indonesia adalah menyangkut privatisasi BUMN dan divestasi berbagai aset yang ada di BPPN. Pendekatan yang digunakan hendaknya jangan hanya dari aspek ekonomi semata dalam jangka pendek, tetapi implikasi yang mungkin timbul bila asset-asset tersebut tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



menjadi milik anak negeri di masa-masa yang akan datang.

Pemicu perkembangan ekonomi Indonesia lainnya pada tahun 2003 adalah bila implementasi otonomi daerah makin baik dan terkoordinasi satu sama lain. Dampak positif dari berbagai pembangunan infrastruktur daerah akan terasa pada paroh kedua tahun 2003. Dinamika masyarakat akan makin tinggi dan arus barang akan makin meluas. Ini berarti perluasan permintaan pasar terhadap berbagai produk akan memberi peluang bagi sektor manufaktur untuk berkembang. Termasuk bila pemanfaatan dana desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang sudah dimulai pada tahun 2001 lalu diperkirakan akan menjadi pemicu baru berkembangnya permintaan domestik.

Hawa politik yang kian memanas perlu diantisipasi secara arif. Budaya politik yang santun sangat diperlukan untuk menjamin terselenggaranya event-event politik di Indonesia secara alami dan positif. Tahun 2003 merupakan *starting point* bagi setiap partai politik untuk mencari konstituen. Meskipun belum dimulai masa kampanye, tetapi tensi politik akan meningkat akibat adanya kampanye-kampanye terselubung yang dilakukan partai-partai. Diharapkan persoalan ini tidak akan mengganggu perbaikan kinerja ekonomi di



Indonesia. Kuncinya adalah melalui penegakan hukum dan kesepakatan bersama terhadap aturan main yang harus ditaati oleh semua pihak.

Tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah harus diperluas pada semakin transparannya pemerintah pusat dalam aspek desentralisasi fiskal. Sumber-sumber dana yang seharusnya sudah menjadi milik daerah harus sesegera mungkin diberikan ke daerah secara pasti dan terbuka. Keadaan ini diperlukan untuk mendorong kemampuan daerah menyusun APBD secara tepat sesuai waktunya. Termasuk sumber-sumber dana dari pusat yang masih dikendalikan secara ketat, seperti Dana Alokasi Khusus. Tahun 2003 disiapkan dana sebesar Rp 625 milyar untuk rehabilitasi 6908 SD dan MI. Sebaiknya pemerintah pusat menyerahkan persoalan perbaikan sekolah dasar ini pada daerah dan dananya diserahkan ke daerah. Berbagai proyek yang didanai oleh DAK juga banyak yang tidak transparan ditentukan pemerintah pusat padahal sumber dananya adalah dari eksploitasi SDA yang ada di daerah.

Berpijak pada berbagai perkiraan dan analisa di atas, maka optimisme perbaikan kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2003 bisa saja jadi kenyataan. Stabilitas keamanan dan kesadaran untuk memulihkan kondisi bangsa yang morat-marut karena multikrisis akan memberi peluang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





untuk bangkit. Momentum pertumbuhan yang cukup baik pada kuartal ketiga tahun 2002 akan memicu pertumbuhan yang relatif baik pula pada paruh pertama tahun 2003. Permintaan domestik yang menguat dan pengeluaran pemerintah yang makin terarah, khususnya di daerah, berkembangnya ekonomi global sehingga ekspor dapat dipacu, dan stabilitas nilai tukar yang makin membaik memberi harapan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perkiraan yang optimis pada 2003 ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 4,5%. Ini dapat terjadi bila faktor-faktor pengganggu dapat terkontrol dengan baik dan kepercayaan internasional dapat dipulihkan secara berangsur-angsur. Jangan sampai hanya mampu “menggantang asap”. Indonesia tidak akan pulih ekonominya tanpa kerja keras dengan perencanaan yang matang. Himpitan ekonomi sekarang hanya akan lepas bila momentum perbaikan ekonomi yang terjadi dapat dimanfaatkan dengan baik. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengaitkan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





# ADA BATANG, CINDAWAN TUMBUH

(Pemilu dan Ekonomi Riau Triwulan I 2004)

Demokrasi di suatu negara tidak jarang membawa bencana dan malapetaka. Di Philipina misalnya, dalam memperebutkan kursi presiden, terjadi insiden peledakan bom yang menewaskan banyak orang. Pergantian kepemimpinan yang bagaimanapun demokratisnya senantiasa rawan konflik. Bagi negara yang budaya demokrasinya sudah mapan dan masyarakatnya yang memiliki etika politik santun kerawanan-kerawanan masih saja harus diperhitungkan. Di mata investor dan para pemburu rente adanya proses pemilihan umum (Pemilu) akan menaikkan resiko investasinya (*risk country*) serta cenderung bermain pada bisnis-bisnis jangka pendek (*speculative*).

Pemilu yang berlangsung di Indonesia faktor resikonya relatif lebih tinggi. Budaya politik yang belum mapan dan rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap perilaku politik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



yang baik tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan antar kontestan dan anggota-anggotanya. Pemerintah sendiri, karena belum terbiasa dalam kehidupan politik yang sehat, kurang mampu menyelenggarakan pesta demokrasi yang menjami tersaluranya aspirasi politik masyarakat secara optimal. Untunglah hubungan antar anak bangsa masih dilandasi oleh rasa persaudaraan dalam kerangka budaya Indonesia yang Pancasilais, gesekan-gesekan antar pendukung partai tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Meskipun diwarnai oleh berbagai protes dan dugaan kecurangan, proses Pemilu Legislatif yang baru saja berlangsung masih dapat terkendali dengan baik. Namun masa-masa rawan tetap saja akan berlangsung karena dua tahapan Pemilu untuk menentukan presiden dan wakilnya masih akan ada.

Implikasinya terhadap perekonomian tetap akan terasa. Menghadapi Pemilu Presiden nampaknya lebih sensitif terhadap stabilitas ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dollar mulai melemah. Para spekulan mulai mengambil situasi ini untuk menjaga kinerja bisnisnya dan sekaligus bisa saja memanfaatkannya untuk memperoleh rente yang lebih besar. Bahkan saat ini sudah terjadi spekulasi-spekulasi valas yang menyebabkan lemahnya rupiah.

Bagi Riau, penyelenggaraan Pemilu nampaknya cukup signifikan mempengaruhi kinerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



ekonominya. Apalagi Riau juga baru saja menyelesaikan proses suksesi kepemimpinan sehingga pada tahap awal masih membutuhkan banyak penyesuaian-penyesuaian kebijakan. Namun demikian dari aspek pertumbuhan masih menunjukkan adanya pergerakan positif. Pasar nampaknya memandang proses pemilihan gubernur yang berjalan mulus dan aman memberi peluang bagi terselenggaranya perekonomian secara baik.

Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS Riau pertumbuhan ekonomi Riau tanpa Migas Triwulan I Tahun 2004 mencapai 7,76%. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan Triwulan IV Tahun 2003 yang tumbuh sebesar 7,58%. Namun jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2004 sentimen ekonomi awal tahun 2004 jauh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Riau Triwulan I 2003 hanya mencapai 6,67% dan pada Triwulan II justru turun menjadi 5,61%. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor keuangan yang mencapai 14,16%. Pertumbuhan ini didongkrak oleh berkembangnya subsektor perbankan yang sangat spektakuler, yakni 118,20%. Seakan-akan pada awal-awal tahun 2004 terjadi transaksi bisnis perbankan yang sangat dinamis. Hanya saja tidak ada data yang dapat memberikan indikasi sumber-sumber penyebabnya. Bila hanya terkait dengan Pemilu tentunya hanya akan bersifat temporer belaka. Sumbangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





sektor ini dalam struktur perekonomian Riau hanya sebesar 4,48%.

Sektor yang dominan menguasai perekonomian Riau adalah pertanian dan industri. Sektor pertanian mampu tumbuh sebesar 5,93% yang lebih banyak ditopang oleh perkembangan sub-sektor perkebunan. Pada Triwulan I Tahun 2004 sub-sektor perkebunan tumbuh sebesar 7,53%. Dibanding dengan triwulan sebelumnya kenaikan pertumbuhan sektor pertanian tidaklah begitu berarti karena pada Triwulan IV tahun 2003 sektor pertanian tumbuh sebesar 5,77%. Sektor industri mengalami lonjakan pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada Triwulan I tahun ini mampu tumbuh sebesar 9,39%. Jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 6,14%. Keadaan ini ditopang oleh berkembangnya sektor industri non-migas yang mampu tumbuh sebesar 11,70%.

Salah satu sub-sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup besar adalah subsektor angkutan udara. Pada Triwulan I sub-sektor ini justru terkoreksi mencapai minus 10,65%. Persaingan bisnis yang makin tajam di dunia penerbangan ternyata membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam sub-sektor ini. Secara keseluruhan dari sub-sektor pengangkutan masih mampu tumbuh sebesar 4,53%. Hanya saja jika





dibandingkan dengan keadaan pada Triwulan IV 2003 sub-sektor ini pertumbuhannya jauh lebih rendah. Sub-sektor angkutan udara sendiri pada Triwulan IV 2003 masih tumbuh sebesar 9,33% sedangkan sub-sektor angkutan secara keseluruhan mampu tumbuh sebesar 7,53%.

Meskipun masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi namun bila dilihat dari komponen penggunaan perekonomian Riau masih diliputi banyak masalah. Struktur penggunaan perekonomian Riau masih didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga. Pada Triwulan II 2004 posisinya mencapai 60,71% yang lebih banyak terkonsentrasi pada konsumsi makanan, yakni mencapai 33,29% atau 54,83% dari total konsumsi rumah tangga. Pertumbuhannya pada periode tersebut hanya mencapai 0,83%.

Konsumsi pemerintah justru terkoreksi mencapai minus 8,44%. Padahal pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 10,29%. Keadaan ini sepertinya dipicu oleh belum adanya kegiatan-kegiatan di pemerintahan pada Triwulan I tahun ini yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Belum adanya kepastian tentang APBD dan adanya transisi legislatif dan eksekutif di Riau serta masih belum finalnya penetapan APBD Riau menyebabkan stimulasinya terhadap ekonomi Riau tidak ada. Justru sebaliknya malah menimbulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



penurunan. Padahal peran Konsumsi Pemerintah dalam struktur perekonomian Riau dari komponen penggunaan masih tinggi yakni 16,30%. Kondisi ini seharusnya memaksa pemerintah untuk menjaga “irama” kegiatannya sehingga tidak menyebabkan fluktuasi yang tajam. Sinkronisasi dalam siklus ekonomi pemerintah perlu dilakukan agar stabilitas ekonomi masyarakat dapat lebih terjamin dan ketidakpastian makin berkurang.

Hal lain yang juga masih memprihatinkan dalam geliat ekonomi Riau adalah kinerja ekspor yang masih banyak terkoreksi oleh kebutuhan impor. Pada Triwulan I Tahun 2004 pertumbuhan ekspor banyak berubah. Bila pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh sebesar 9,55%, maka pada triwulan ini turun mencapai minus 0,11%. Artinya, kinerja ekspor Riau terkoreksi cukup tajam jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Sejalan dengan itu aktivitas impor juga mengalami hal yang sama.

Pada Triwulan IV Tahun 2003 tumbuh sebesar 10,78% dan pada triwulan ini menurun menjadi minus 2,14%. Keadaan ini menggambarkan bahwa kegiatan-kegiatan ekspor Riau masih belum mampu memberi pengaruh yang berarti bagi kinerja perekonomian Riau. Apalagi dari segi impor, Riau sangat sensitif karena perubahan dinamika pasar internasional mampu



beresonansi dengan pasar lokal di Riau. Bila resonansi masuk tersebut tidak dapat ditimpali oleh resonansi keluar maka akan terjadi koreksi dalam pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi yang lain akan tersedot untuk kepentingan-kepentingan impor.

Dari gambaran di atas nampaknya ada permulaan yang relatif baik bagi berkembangnya perekonomian Riau untuk tiga triwulan mendatang. Meskipun akan berhadapan dengan tantangan yang cukup besar harapan untuk berkembang relatif baik. Tersusunnya “Kabinet” Pemerintahan Gubernur Riau dan tuntasnya penyusunan APBD akan memberikan sentimen yang positif bagi bergeraknya ekonomi Riau ke depan. Khusus dari aspek pengeluaran pemerintah diharapkan sektor swasta akan terpacu untuk mau berinvestasi sehingga kinerja ekonomi tidak banyak bertopang pada Konsumsi Rumah Tangga. Pekerjaan yang cukup berat yang dihadapi dari aspek ekonomi adalah bagaimana memanfaatkan peluang pasar global untuk memperbaiki kinerja ekspor Riau.

Diversifikasi produk dan ekspansi pasar mulak harus dilakukan agar ketergantungan dapat dikurangi dan rembesannya pada perbaikan ekonomi rakyat makin membesar. Untuk itu dalam APBD 2004 diharapkan adanya anggaran khusus dalam pengembangan ekspor berbasis masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



disamping memacu tersedianya infrastruktur yang mampu mendorong investasi. Sikap pesimis tidak perlu diambil oleh para pebisnis. “*Ada batang, Cendawan tumbuh*”, begitu istilahnya. Meskipun geliat ekonomi Riau belum begitu cerah, tetapi geliat tersebut masih lebih baik ketimbang wilayah lain. Mengais rezeki di Riau masih memiliki prospek yang lebih baik dari tempat lainnya di Indonesia. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository Universitas Negeri Riau

<https://repository.unri.ac.id>



Hak cipta milik Universitas Riau





# AWAN MENGANDUNG HUJAN

(Prospek Ekonomi Riau Tahun 2004)

Survey ekspektasi konsumen yang dilakukan Bank Indonesia di Kota Pekanbaru untuk Triwulan Kedua Tahun 2004 mengindikasikan adanya penurunan keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian sekarang dan prospeknya enam bulan ke depan. Hasil survey menemukan adanya penurunan dalam Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini dari 82,67 menjadi 74,83. Ini berarti konsumen semakin pesimis terhadap perekonomian yang ada sekarang, baik itu ditinjau dari apa yang diperoleh masyarakat dari dinamika ekonomi yang terjadi maupun persepsi mereka dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang.

Secara gamblang hasil survey menggambarkan melemahnya rasa optimisme konsumen atas penghasilan yang mereka peroleh saat ini yang terdramatisasi dari menurunnya indeks dari 147,5 menjadi 135,0. Sumber penyebabnya adalah persepsi konsumen yang mengatakan penghasilannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



akan meningkat mengalami penurunan dari 57,5% menjadi 46,0%. Ini berarti sebahagian besar masyarakat tidak yakin akan terjadi perbaikan pendapatan mereka untuk enam bulan yang akan datang dengan memperhatikan kondisi ekonomi mereka sekarang ini. "*Bak awan mengandung hujan*", segitu sesuatunya masih dalam ketidakpastian. Oleh karenanya konsumen berpersepsi bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membeli barang, terutama barang-barang tahan lama. Konsumen yang menyatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli barang tahan lama menurun tajam dari 32,5% menjadi 16,5%. Penyebab dari rasa pesimis ini adalah terbatasnya kondisi keuangan dengan prospek yang lebih suram untuk berkembang dan tinggi/mahalnya harga-harga saat ini.

Harapan konsumen ke depan terhadap perekonomian Riau tetap saja besar. Tekanan ekonomi yang terjadi saat ini menumbuhkan kece- masan sekaligus juga rasa ingin berkembang yang semakin besar. Konsumen ingin segera terlepas dari stagnasi ekonomi yang mereka alami saat ini. Survei Ekspektasi Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari 96,33 menjadi 99,0. Keadaan ini muncul dari keyakinan konsumen terhadap akan adanya perbaikan per-



ekonomian Indonesia enam bulan ke depan. Namun demikian konsumen merasa bahwa perbaikan pendapatan mereka tidak akan makin membaik. Sebagian besar (64,0%) konsumen menganggap pendapatannya tidak akan berubah dan bahkan memprediksi akan mengalami penurunan. Apalagi trend harga dipersepsikan masih akan berada pada posisi yang tinggi karena situasi sosial politik dan keamanan yang kurang stabil, kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang akan melemah, dan berkurangnya ketersediaan barang dan jasa di pasar.

Harapan konsumen akan adanya perbaikan kondisi keuangan mereka untuk 6-12 bulan ke depan mengalami penurunan. Indeks Ekspektasi Keuangan menciut dari 142,25 pada Triwulan I Tahun 2004 menjadi hanya 127,75 pada Triwulan II ini. Ekspektasi konsumen terhadap penghasilannya memburuk dari 159,0 menjadi 141,0. Dengan sendirinya harapan untuk menabung semakin rendah dan hasrat untuk mengkonsumsi barang juga akan melemah.

Dari survey dapat dideteksi adanya penurunan ekspektasi konsumen untuk membeli barang sandang, perumahan, peralatan dan perabot rumah tangga, kendaraan bermotor, serta pengeluaran untuk rekreasi/tamasya. Konsumen cenderung akan membatasi alokasi pendapatannya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





keperluan-keperluan dimaksud untuk menjadi stabilitas ekonomi rumah tangganya terutama dalam menanggulangi kebutuhan-kebutuhan primernya. Bila ini benar-benar terjadi maka gairah ekonomi yang bersumber dari investasi dan konsumsi masyarakat akan menurun. Pemerintah diharapkan dapat mendorong berkembangnya perekonomian daerah dari investasi pembangunan yang dilakukannya. Arah dari program-program pemerintah harus tertuju pada mempercepat gerakannya sektor riil dan menstimulus investasi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang menjangkau dan signifikan.

Memburuknya persepsi konsumen terhadap perekonomian di Riau bisa saja dipicu oleh belum berjalannya program-program pemerintah di paruh pertama Tahun 2004 ini. Bahkan sentilan yang sangat tajam dari beberapa anggota DPRD Riau terhadap lemahnya kinerja birokrasi Riau dalam mengimplementasikan program pembangunan makin memperkuat keyakinan masyarakat terhadap belum adanya upaya-upaya kongkrit yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Keasyikan melakukan kegiatan-kegiatan seremonial tanpa mempercepat langkah-langkah nyata memperbaiki keadaan dengan sendirinya akan menyebabkan pemerintah kalah cepat dari dinamika ekonomi yang berkembang. Distorsi





ekonomi akan makin membesar dan kehidupan ekonomi masyarakat dapat semakin memburuk akibat tekanan-tekanan pasar yang tidak seimbang (*unbalance market*).

Di Riau kiranya terdapat beberapa hal yang menyebabkan melemahnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian, khususnya dikaitkan dengan faktor-faktor di luar ekonomi. *Pertama*, belum selesainya tahapan Pemilu sehingga perhatian dan energi masih akan banyak tercurah dalam kerangka merebut kekuasaan. Ditimpali pula oleh kurang bekerjanya lembaga legislatif dalam melaksanakan kontrol karena mereka sendiri baru berada dalam masa-masa transisi. Konon, anggota DPRD yang ada sekarang sebahagian besar sudah tidak masuk kantor, padahal DPRD yang baru belum lagi dilantik.

*Kedua*, belum adanya *platform* yang jelas terhadap pelaksanaan pembangunan di Riau terutama dikaitkan dengan pemusatan anggaran pada isu pokok kemiskinan dan kebodohan yang didengung-dengungkan selama ini. Walaupun sudah ada, namun sampai dengan paroh pertama tahun 2004 ini sosialisasinya boleh dikatakan tidak ada. Masyarakat dengan sendirinya belum faham terhadap “siapa berperan apa”. Artinya prinsip-prinsip pembangunan partisipatif tidak berjalan dengan baik. Pada akhirnya pemerintah hanya akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



berindak sebagai orang yang paling benar meskipun masyarakat menilai itu tidak benar. Ini berarti otokrasi yang dibesar-besarkan dapat disalahartikan hanyalah upaya untuk menutup kelemahan dalam mengkristalisasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk dicarikan solusinya dalam program-program pembangunan.

*Ketiga*, banyak langkah-langkah politik yang dilakukan pemerintah Riau yang menimbulkan bias makna dalam masyarakat. Terutama dalam kasus Provinsi Kepri, baik berkaitan dengan penunjukan *caretaker* gubernur maupun adanya isu upaya permohonan terhadap penangguhan penahanan Huzrin Hood oleh Gubernur Riau. Kalau itu benar maka proses politik yang dimainkan pemerintah daerah sangat tidak bersentuhan dengan upaya-upaya perbaikan ekonomi masyarakat. Bahkan tindakan tersebut justru dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum yang akan membuat masyarakat makin pesimis terhadap perbaikan ekonominya. Di samping itu juga disinyalir porsi kegiatan seremonial lebih besar ketimbang memastikan berjalannya program pembangunan secara optimal.

*Keempat*, dari beberapa komentar yang dibaca di media masa aroma KKN dalam penempatan birokrasi pemerintah Riau sangat kental.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Jenjang karir dan pendidikan penjenjangan banyak diabaikan. Termasuk latar belakang pengalaman kerja dan profesionalismenya. Bagaimana mungkin seorang yang berpendidikan teknik dan sepanjang karir birokrasinya hanya dalam bidang-bidang teknik bisa ditempatkan pada jabatan yang harus menangani bidang administrasi pemerintahan. Termasuk orang yang lompat pagar tanpa melalui jabatan eselonisasi sebelumnya bisa loncat ke eselon yang tinggi. Sementara yang lainnya dengan persyaratan yang cukup, pendidikan yang memadai, pengalaman yang panjang di bidang itu dan kinerja yang baik, harus gigit jari dan terpaksa menerima kenyataan dilangkahi pejabat karbitan tersebut. Badan Administrasi Kepegawaian seharusnya mampu menempatkan pejabat birokrasi yang bisa mendukung terselenggaranya implementasi program pembangunan secara efisien dan efektif.

Bila perekonomian rakyat mau dikembangkan dan kemiskinan mau dientaskan dari mereka, maka selain indikator-indikator ekonomi yang harus diperbaiki perlu pula diperhatikan indikator lain di luar ekonomi. Tidak jarang *platform* ekonomi yang tersusun baik justru mentah akibat lemahnya kemampuan birokrasi pelaksana, rendahnya kepastian hukum, terganggunya stabilitas sosial politik, dan adanya intervensi negatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga menim-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



bulkan kesan inkonsisten. Selain membutuhkan *Integrated Planning* dan *Holistic Approach*, pembangunan ekonomi yang memadai juga membutuhkan situasi yang kondusif dengan kebijakan yang konsisten dan pasti. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





# BAGAI MENEPUNG TANPA BERBERAS

(Evaluasi Ekonomi Riau 2004)

Kinerja ekonomi Riau selama tahun 2004 ini tidaklah secerah apa yang diharapkan masyarakat. Upaya-upaya perbaikan ekonomi rakyat yang senantiasa didengungkan dalam pidato-pidato justru belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Setahun berjalan nampaknya rakyat Riau seperti terkesima dengan persoalan-persoalan politik sehingga kurang memantau aspek perbaikan ekonomi masyarakat. Berbagai kegiatan politik yang terjadi di tanah air memang memberikan harapan masa datang yang lebih cerah. Sayangnya, ketika peristiwa politik berlalu tidak jarang harapan-harapan menjadi kelabu.

Ekonomi Riau pada Triwulan IV tahun 2003 masih mampu tumbuh sebesar 7,58% ternyata pada waktu yang sama tahun 2004 hanya mampu tumbuh 6,49%. Sepanjang tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Riau senantiasa mengalami kemerosotan. Jika pada Triwulan I masih mampu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



tumbuh sebesar 7,76%, maka pada Triwulan II turun menjadi 6,62%. Meskipun pada Triwulan III sedikit membaik menjadi 6,65%, tetapi pada Triwulan IV anjlok lagi menjadi hanya 6,49%. Ini berarti rata-rata sepanjang tahun 2004 ekonomi Riau hanya mampu tumbuh sebesar 6,88%. Ini berarti juga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2004 jika dibanding tahun 2003 yang pertumbuhan rata-ratanya mencapai 7,65%.

Diamati dari aspek sektoral atau sisi penawaran maka sektor pertanian mengalami kemerosotan pertumbuhan yang cukup tajam. Padahal sektor ini kontribusinya relatif besar pada struktur perekonomian Riau. Awal tahun 2004 sektor pertanian masih mampu tumbuh sebesar 5,93%, tetapi pada akhir tahun 2004 pertumbuhannya hanya sebesar 4,44%. Keadaan ini mengindikasikan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian makin tercekik. Sebahagian besar masyarakat Riau bekerja di sektor pertanian sehingga gemar-gembor pemberantasan kemiskinan yang dikumandangkan selama ini dalam kenyataannya justru bertolak belakang. Masyarakat petani malah makin terhimpit dan makin kurang produktif. Padahal pada satu sisi kebutuhan-kebutuhan pengeluaran mereka makin bertambah sejalan dengan naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Sektor yang berkembang pesat adalah perdagangan, hotel, dan restoran. Pada akhir tahun 2003 sektor ini tumbuh sebesar 6,41% sedangkan pada akhir tahun 2004 tumbuh mencapai 7,59%. Ini berarti geliat ekonomi Riau banyak terjadi di pasar-pasar, hotel-hotel, dan restoran. Tidak banyak masyarakat Riau yang semula menjadi petani beralih profesi menjadi pedagang. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor perdagangan, hotel, dan restoran tidak terjadi dari desa-desa yang ada di Riau.

Sumber pengadaan tenaga kerjanya justru masuk dari luar Riau. Pedagang pasar banyak yang datang dari Sumbar, sedangkan hotel dan restoran selain dari Sumbar juga banyak datang dari Jawa. Ini menguatkan dugaan bahwa tekanan marginalisasi masyarakat Riau pada tahun 2004 justru bukannya kurang, malah bertambah berat. Keinginan untuk melakukan konsumsi di sektor perdagangan makin besar sementara *income* di sektor pertanian makin mengecil. Secara psikologis ini akan membawa dampak pada makin besarnya potensi terjadinya kerawanan-kerawanan sosial.

Pendapatan masyarakat petani akan semakin banyak disedot oleh pelaku-pelaku bisnis di sektor perdagangan sedangkan pada satu sisi peningkatan pendapatan makin melambat. Oleh karena itulah mungkin saat ini di berbagai wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





pedesaan di Riau tidak jarang didengar terjadinya kejahatan-kejahatan pencurian.

Kenyataan di atas makin terasa bila di-dekati dari sudut permintaan. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi Riau makin melemah. Di satu sisi ini merupakan gejala membaik jika peran investasi dan ekspor makin membesar. Apalagi bila peran pemerintah sebagai stimulan juga berjalan dengan baik. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS Riau peran pemerintah ternyata tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada akhir tahun 2003 peran pemerintah sebesar 16,37% maka pada akhir tahun 2004 hanya naik menjadi 16,46%. Peran pembentukan modal tetap netto justru menurun dari 28,37% pada akhir tahun 2003 menjadi 27,51%.

Tekanan impor non-migas justru makin membesar dibandingkan perbaikan kinerja ekspor. Komponen ini mengindikasikan bahwa produk-produk ekspor berbasis masyarakat belum digarap secara profesional sejalan dengan terbukanya peluang dalam era pasar bebas. Justru sebaliknya produk-produk lokal makin terdesak oleh produk asing yang makin merambah supermarket dan bahkan sampai ke pasar-pasar tradisional. Mulai dari makanan kaleng, buah-buahan, sampai pada makanan cemilan banyak yang berasal dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan China.





Pada akhir tahun 2003 pertumbuhan ekonomi dari sisi ekspor sebesar 9,55% dan tahun 2004 naik menjadi 10,13%. Peranannya dalam perekonomian Riau naik dari 77,95% menjadi 78,91%. Sedangkan komponen impor pertumbuhannya pada akhir tahun 2003 sebesar 10,78% pada tahun 2004 naik menjadi 10,81%. Perannya terhadap perekonomian Riau juga mengalami kenaikan dari 77,95% menjadi 79,89% pada akhir tahun 2004. Ini berarti kinerja ekspor tereliminir oleh kebutuhan impor dalam perekonomian Riau dengan peran minusnya sebesar 0,88%.

Sektor lain yang melemah pertumbuhannya adalah listrik dan air bersih. Pada akhir tahun 2003 pertumbuhannya mencapai 6,62%. Sedangkan pada akhir tahun 2004 anjlok sampai hanya mampu tumbuh 3,96%. Padahal sektor ini sangat vital peranannya dalam memikat investasi. Infrastruktur listrik dan air bersih memberikan peranan penting bagi terselenggaranya investasi swasta dan masyarakat. Jika sektor ini tidak bergairah, padahal kebutuhannya masih sangat besar, maka upaya-upaya untuk memajukan perekonomian masyarakat akan menjadi slogan semata.

Peran pemerintah terhadap perekonomian Riau juga tidak mencengangkan. Kontribusi Konsumsi Pemerintah hanya naik dari 16,37% menjadi 16,46%. Padahal dana trilyunan rupiah masuk ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Riau. Ini berarti kemampuan pemerintah menggerakkan ekonomi Riau tidak makin membaik. Hal ini memang terindikasi dengan kurang berjalannya proyek-proyek pemerintah di Riau. Pemerintah provinsi saja sampai pertengahan Desember 2004 baru mampu merealisasikan kegiatannya sebesar 63,77%. Inipun belum dapat dipastikan apakah proyek-proyek tersebut bersentuhan dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Indikasi *mark-up* dan KKN dalam pelaksanaannya sangat kentara.

Kecurigaan terhadap ini makin menguat dengan besarnya uang yang dikirim ke luar Riau pada Triwulan III dan IV melalui fasilitas RTGS Bank Indonesia. Pada Triwulan II uang yang masuk ke Riau hanya Rp 11,552 trilyun sedangkan uang yang keluar Riau mencapai Rp 20,25 trilyun. Berarti *money outflow* dari Riau mencapai sekitar Rp 8,7 trilyun. Kondisi ini terjadi ditopang pula oleh banyaknya perusahaan-perusahaan non-Riau yang mencari makan di Riau, tetapi tidak berkantor di sini.

Memasuki tahun 2005 tantangan perekonomian Riau bukan akan semakin mengecil. Mulai melosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, baik di pusat maupun daerah, kenaikan harga BBM, dampak lanjutan dari bencana alam, tekanan pasar global yang kian deras, dan faktor-faktor endogen lainnya merupakan tanta-



ngan yang harus dihadapi dalam kerangka mem-berantas kemiskinan dan kebodohan di Riau. Pen-dekatan untuk menghadapinya tentu tidak bisa dengan hanya sekedar mengumbar harapan kepada masyarakat. “*Bagai menepung tiada berberas,*” demikian kira-kira istilahnya. Perlu perencanaan dan kontrol yang baik dalam mengimplementasi-kan program. Itu tidak mungkin dilakukan dengan bersolo karir (*one man show*). Segenap potensi mas-yarakat harus digalang dengan cara-cara yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Termasuk APBD janganlah hanya memperkaya pejabat dan kroni-kroninya. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



# TERPISAH BUKANNYA BERCERAI

(Meneroka Ekonomi Riau Pasca Lepasnya Provinsi Kepri)

Terpisahnya Kepulauan Riau dari Provinsi Riau tidak serta-merta menyebabkan entitas ekonomi kedua wilayah tersebut menjadi terbagi dua. Administrasi pemerintahan tidak akan menyebabkan adanya garis batas ekonomi antar wilayah. Apalagi kedua wilayah ini masih dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamika ekonomi akan berjalan seperti apa adanya, bahkan mungkin akan lebih dinamis. Rentang kendali pemerintahan semakin pendek dan ini membuka peluang bagi percepatan pelayanan pemerintah, khususnya dalam memfasilitasi dan memotivasi pihak swasta menanamkan modalnya untuk mengolah sumber-sumber ekonomi yang tersedia di wilayah itu.

Pembangunan infrastruktur dapat semakin difokuskan pada bidang-bidang yang spesifik menunjang dan memperlancar kegiatan ekonomi. Untuk Riau Kepulauan mungkin diarahkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





penyediaan air bersih di berbagai pulau dan pengembangan prasarana pariwisata untuk menopang pemasaran dari objek-objek wisata yang bertebaran di berbagai pulau. Prasarana transportasi laut dibangun untuk menunjang lalu lintas orang dan barang. Termasuk memperbesar akses pemanfaatan sumberdaya laut untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir pantai. Ruang gerak perdagangan harus diperluas agar tidak terpusat hanya di Pulau Batam dan Bintan. Pusat-pusat pengembangan ekonomi baru dapat ditumbuhkan, seperti di Karimun dan Natuna.

Bagi Riau Daratan, walaupun sebahagian besar PAD terkuras oleh Riau Kepulauan dan Nilai Tambah Ekonomi yang disumbangkan wilayah itu tidak lagi menopang pertumbuhan ekonomi, namun bukan berarti pergerakan ekonomi wilayah daratan akan langsung mengkerucut. Dinamika ekonomi akan berjalan sebagaimana biasa dan bahkan mungkin ada faktor-faktor lain yang justru akan memberikan dorongan. Salah satu di antaranya adalah pengembalian dana bagi hasil minyak yang selama ini diterima kabupaten non-penghasil di Kepulauan Riau selanjutnya akan mengalir ke beberapa kabupaten non-penghasil di wilayah daratan. Ini berarti akan ada stimulan baru bagi daratan yang bersumber dari *Government Expenditure* pada daerah-daerah kabupaten non-penghasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



yang membesar. Biasanya sektor-sektor yang akan menggeliat adalah sektor konstruksi, jasa, dan keuangan. Termasuk perdagangan dalam mendukung sektor-sektor tersebut.

Hanya saja Pemerintah Riau Daratan harus jeli memilih sektor-sektor ekonomi yang potensial. Pengembangan ekonomi rakyat mutlak dipercepat mengingat ketertinggalan wilayah daratan dari aspek itu sangat kentara. Usaha yang mungkin ditempuh adalah dengan memanfaatkan *marginal revenue* tadi pada pengembangan industri hilir pertanian untuk menjamin persaingan pasar yang sehat dan komoditas pertanian masyarakat. Sentra-sentra pasar baru harus dikembangkan dan infrastruktur yang akan memperlancar arus barang dari sentra produksi ke sentra pasar harus dibangun secepatnya. Termasuk bagaimana menjamin penyediaan listrik yang memadai bagi kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri rakyat. Jalan-jalan poros utama yang menghubungkan Riau Daratan dengan provinsi tetangga diperlancar dan jalan poros utama ke wilayah pesisir seperti Buton, Dumai, dan Kuala Enok.

Ada baiknya juga Riau Daratan mengembangkan wilayah ini sebagai kawasan industri baru untuk melengkapi kawasan industri yang sudah ada sekarang. Pengembangan Riau Bagian Selatan sebagaimana yang telah dirintis sebelumnya se-



bagianya diteruskan dan dikaitkan dengan wilayah-wilayah pesisir lainnya. Jalan poros Kuansing ke Pekanbaru dan Buton serta Kuansing ke Inhu dan Kuala Enok perlu digesa untuk meningkatkan gairah ekonomi wilayah-wilayah tersebut. Sedangkan wilayah Kampar ke Sumbar dan Pekanbaru diperluas dan Rokan Hulu, Duri, dan Sumatra Utara dan Sumbar diperlancar untuk membuka akses timbal balik wilayah tersebut.

Di balik semua itu, makin cepatnya dinamika ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat tidak jarang mengubah pola hidup dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat yang sedang mengalami transisi, apalagi yang relatif cepat sangat rentan terhadap infiltrasi budaya lain di luar dari apa yang dipegangnya sebelum ini. Keadaan ini diperparah oleh kejelian para pemburu rente untuk menawarkan berbagai bentuk produk dan jasa yang bersifat konsumtif dan bahkan sering bersentuhan dengan aroma-aroma maksiat.

Dunia hiburan malam dan berbagai perangkat permainan yang cenderung berbau judi akan marak bila tidak ada benteng yang kuat untuk menghalanginya. Benteng tersebut tidak saja dari adanya proteksi pemerintah tetapi juga kekuatan integritas budaya masyarakat. Jika tidak cepat terpancing untuk keluar dari nilai-nilai budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Melayu maka dinamika ekonomi akan tetap sulit memporak-porandakan nilai-nilai budaya tersebut.

Sayangnya, dekadensi moral dan melunturnya penerapan nilai-nilai budaya Melayu dalam tata hidup masyarakat di Riau Daratan, khususnya di kota-kota makin menggejala. Ini berarti menempatkan budaya Melayu dalam Visi Riau 2020 sangatlah relevan. Bahkan walaupun sudah terpisah antara daratan dan lautan makna yang terkandung dalam visi itu masih sesuai untuk dicita-citakan. Sebagai provinsi yang baru Riau Kepulauan sebaiknya menentukan visi baru untuk lebih mengedepankan identitasnya, tetapi apapun bunyinya secara harfiah sebaiknya tidak keluar dari adanya kearifan yang menggambarkan masyarakat Melayu yang sejahtera dari segi ekonomi tanpa kehilangan identitas dan integritas kemelayuannya. Artinya apapun yang dilakukan masyarakat dan pemerintahnya hendaklah merupakan upaya untuk mencapai masyarakat Melayu yang sejahtera lahir bathin dalam lingkungan masyarakat yang agamis.

Bagi Riau Daratan juga tidak tertutup kemungkinan untuk mencoba merekayasa ulang bunyi harfiah dan makna-makna yang terkandung dalam sebuah visi ke depan. Hanya saja jangan sampai terperangkap pada sebuah keinginan “tampil beda” semata. Kalau ingin mengubah haruslah lebih baik dari yang sudah ada sekarang. Jangan





malan menghilangkan yang sudah ada, tetapi tanpa melahirkan sesuatu yang lebih bernas dan bermakna. Mengatakan salah, tetapi nggak mampu menunjukkan yang lebih benar. Terutama sekali meyakinkan orang banyak bahwa itulah yang lebih baik dari apa yang sudah ada sebelum ini. Merupakan tantangan yang menarik tentunya bagi pemerintah Riau yang sekarang untuk mencoba melahirkan gagasan-gagasan bernas ke arah itu. Tetapi sekali lagi jangan sampai hanya menjadikan Riau ini sebagai wadah mendiskusikan cita-cita tanpa waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu yang dapat mencapai cita-cita dimaksud. Itu *mah* kata orang disebut dengan *NATO (No Action Talk Only)*, jangan hanya pandai bercuap. Beriak tanda tak dalam, tong kosong selalu nyaring bunyinya.

Berpisahannya Kepulauan Riau sebagai provinsi sendiri bukan berarti tali kekerabatan masyarakatnya akan bercerai dan terputus. Mungkin untuk Riau tidak hanya diperlukan dua provinsi. Bila perlu secara administrasi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat provinsi, yakni Provinsi Riau Pesisir, Provinsi Riau Kepulauan, Provinsi Riau Daratan, dan Provinsi Indragiri. Bila masing-masing wilayah dapat dikembangkan sumber-sumber ekonomi yang mampu menopang kemandirian wilayah tersebut maka keberadaan administrasi pemerintahan dengan *span of control* yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



lebih pendek akan lebih efektif. Pemerintah sebagai pelayan publik hanya berfungsi sebagai fasilitator dan pelaksana dari komitmen rakyat. Manajemen pemerintahan diarahkan untuk memperlancar penyelenggaraan urusan-urusan publik. Bukan untuk menguasai dan mencekik rakyat dengan berbagai kewenangan yang justru diberikan rakyat kepadanya.

Biarkan masyarakat berkembang dengan segala bentuk dinamikanya. Tidak lagi mungkin dalam dunia global dengan segala kecanggihan teknologinya ada *barrier* dari pemerintah maupun penguasa. *Mobil Banking* sudah dapat memutuskan jarak. Serat optic mempersempit ruang dan satelit memperpanjang pandang. Dalam waktu yang tidak berapa lama lagi bukan hanya suara, gerak-gerik, dan warna yang dapat dipindahkan oleh teknologi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam kurun waktu yang bersamaan, tetapi juga bau atau aroma sesuatu. Begitu cairnya peradaban yang tertuang saat ini dan mampukah Budaya Melayu menjadi perapis agar anak jati Melayu tidak “berseng-gama” dengan layar telepon bimbit (*handphone*)-nya. Quo-vadis Riau? ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



# AIR PASANG, TEPIAN BERALIH

(Memetakan Prospek Ekonomi Riau 2005)

Portret suram ekonomi Riau di tahun 2004 bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Bagi kalangan pebisnis peluang untuk berkembang tetap menjanjikan. Mulai akhir tahun 2003 sampai tahun 2004 proses pergantian pimpinan nasional dan daerah banyak menyita energi. Setelah proses itu beralih masih pula diperlukan berbagai penyesuaian dengan gaya pemimpin yang baru. Kebijakan-kebijakan baru lahir dan terkadang tidak jarang melupakan aspek kesinambungan dari apa yang dilansir sebelumnya. Di Indonesia setiap kali pergantian pimpinan selalu pula mengadakan perubahan-perubahan. Bak kata pepatah, “*Sekali air pasang, sekali tepian beralih.*”

Untuk menangkap peluang bisnis yang mungkin terbuka, berbagai kebijakan pemerintah secara nasional dan daerah memang harus dipantau secara seksama dan teliti. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat menjadi tantangan dan dapat pula menjadi peluang yang



meningkatkan. Bahkan mungkin akan menjadi penghambat yang permanen. William F. Gluek dan Lawrence R. Jauch dalam bukunya *Strategic Management and Business Policy* mengingatkan bahwa falsafah pemerintah dalam hubungannya dengan perusahaan dapat berubah sewaktu-waktu. Ini merupakan aspek penting yang harus ditelaah para perencana strategi perusahaan.

Hukum dan peraturan serta kebijakan pemerintah lainnya dapat mengubah cara perusahaan beroperasi dari hari ke hari. Baik karena peraturan itu sendiri berkenaan langsung dengan perusahaan maupun karena imbasnya pada aspek lain tetapi dapat mengganggu atau bahkan membuka peluang yang signifikan terhadap dinamika usaha masa datang. Termasuk kebijakan anggaran pemerintah dalam menstimulus perkembangan perekonomian masyarakat.

Dalam konteks Indonesia saat ini gebrakan yang dilakukan pemerintah SBY-JK pada satu sisi sangat memberi prospek yang cerah bagi perekonomian. Pemberantasan korupsi, bila dijalankan secara sungguh-sungguh, akan memberi kepastian berusaha yang transparan dan akuntabel. Persaingan usaha akan semakin adil bila suap-suap dalam tender proyek pemerintah dapat dikurangi. Ini berarti akan ada margin tambahan bagi para pengusaha. Efek lanjutannya adalah membaiknya





konsumsi sektor swasta dan terbukanya peluang kerja baru di sektor ini. Namun demikian kebijakan menaikkan harga BBM akan menimbulkan dampak yang cukup besar pada kenaikan harga-harga sehingga daya beli masyarakat makin turun. Padahal peran konsumsi masyarakat dalam menopang pertumbuhan ekonomi selama ini sangat besar.

Bila program pengalihan subsidi BBM tidak berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban-beban tetap masyarakat maka gangguan terhadap stabilitas ekonomi akan muncul. Apalagi para spekulan minyak yang selama ini sangat menikmati disparitas harga dalam negeri dan luar negeri akan ikut bermain mempengaruhi masyarakat yang terkena dampak jangka pendek dari kenaikan BBM. Termasuk para konglomerat yang selama ini sangat nyaman dengan adanya subsidi BBM.

Di tingkat lokal persoalan ditariknya kembali sebahagian kewenangan pemerintah daerah dalam hal anggaran dan personil akan menimbulkan nuansa baru lagi bagi para kontraktor daerah yang selama ini telah menjamur. Meski pemerintah pusat berteriak akan memberantas KKN, tetapi di lapangan persoalan-persoalan itu tetap menjamur. KKN yang terpusat dapat saja muncul kembali sehingga pengusaha daerah dengan kemampuan material dan dana yang terbatas akan sulit me-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



meningkatkan kompetisi. Namun bagi Riau, mengingat besarnya anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah (APBD), baik propinsi maupun kabupaten peluang-peluang untuk memacu berkembangnya ekonomi masyarakat Riau masih terbuka lebar. Hal ini dapat direalisasikan bila kebijakan anggaran yang dilakukan diarahkan untuk memacu investasi swasta masuk ke Riau. Caranya tentu bukan dengan membengkakkan anggaran untuk paksaan dinas, perawatan kesehatan pegawai, biaya rumah tangga, makan/minum kantor dan lain-lain yang berbau pemborosan. Bayangkan saja untuk pemerintah propinsi semua biaya-biaya tersebut dalam RAPBD diancang sekitar Rp 93 milyar lebih.

Pemanfaatan dana publik untuk kepentingan perbaikan mutu hidup masyarakat sangat urgen diterapkan kalau Riau tidak mau terpuruk di masa datang. Biaya cetak yang mencapai Rp 5 milyar di salah satu instansi memang sangat memprihatinkan. Bila jumlah penduduk Riau Daratan 4,5 juta jiwa dengan harga cetak Rp 100,- per lembar maka setiap orang akan kebagian sebanyak 11 lembar blangko hasil cetakan. Tanpa peduli orang itu baru lahir atau sudah manula.

Tantangan lain ekonomi Riau tahun 2005 adalah giatnya China merambah pasar komoditas dunia. Peluang pasar global akan bersaing dengan produk-produk China daratan yang cenderung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



menggunakan praktik *dumping*. Selain itu relokasi perusahaan-perusahaan Malaysia dari industri berbasis sumberdaya alam ke *high-tech and robotic industry* merupakan hal-hal yang perlu diantisipasi sesuai dengan karakter bisnis yang digeluti pengusaha-pengusaha Riau. Kesempatan untuk investasi *downstream* industri dengan basis CPO dan hasil olah karet alam cukup menjanjikan bagi perbaikan ekonomi rakyat Riau. *Backward linkage* industri ini akan memacu perbaikan pendapatan petani. Peluang kerja secara horizontal akan terbuka sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan bawahan dari industri hilirnya. Ini mengindikasikan bahwa bila pandai mengelola daerah ini maka upaya-upaya peningkatan pendapatan petani secara spektakuler bukanlah sesuatu yang mustahil.

Sinyal akan diimplementasikannya otonomi desa oleh pemerintah Riau yang disejajarkan pula dengan beberapa kebijakan lainnya seperti pembangunan perkebunan rakyat, sertifikasi lahan, redistribusi asset, dan termasuk mungkin upaya-upaya pemanfaatan lahan tidur merupakan kebijakan yang akan sangat mendorong dinamika ekonomi di tingkat akar rumput. Bila dijalankan secara sungguh-sungguh oleh aparaturnya pelaksana di lapangan maka akan terjadi keseimbangan pergerakan ekonomi antar wilayah. Uang yang berputar di desa akan makin besar dan peluang mas-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





yarakat miskin untuk memperbaiki sumber-sumber pendapatannya makin terbuka. Melalui perbaikan infrastruktur desa dan dukungan permodalan akan terdidi perluasan usaha masyarakat. Konsumsi dengan sendirinya akan meningkat sehingga sektor perdagangan akan makin berkembang.

Limpahan penduduk dari daerah sekitar juga merupakan tantangan dan peluang tersendiri bagi rakyat Riau untuk berkembang. Bila yang datang adalah para *entrepreneur* maka kesempatan untuk bersaing dan mungkin bermitra akan terbuka lebar. Paling tidak ada usaha-usaha baru yang akan muncul dan sumber-sumber bahan bakunya akan mengolah produk-produk rakyat Riau. Dulu tidak banyak Pecel Lele dan Nasi Uduk yang mangkal di pinggir-pinggir jalan kota, sekarang menjamur bak cendawan tumbuh. Peternak Ayam dan Ikan Lele memiliki pasar yang cukup potensial sejalan dengan banyaknya konsumen yang makan Nasi Uduk dan Pecel Lele. Setiap warung tenda tidak jarang membawa enam orang pekerja. Ini tentunya akan menjadi konsumen baru di Riau. Mal dan Supermaket tetap akan memiliki pengunjung dan pembeli yang memadai. Roda perputarannya akan tetap naik sehingga investasi baru akan muncul dan tenaga kerja akan memiliki peluang untuk bekerja.

Banyak hal-hal yang sangat berpotensi untuk menggerakkan ekonomi Riau tahun 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Berembangnya sektor perdagangan, membaiknya harga komoditas primer masyarakat sejalan dengan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang dilakukan pemerintah. Tumbuhnya industri-industri hilir yang berkait erat dengan masyarakat serta adanya dukungan permodalan untuk industri rumah tangga di pedesaan memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2005. Pemerintah yang kian stabil, meski masih akan diwarnai oleh maraknya Pilkada, merupakan dukungan positif untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi Riau seperti sebelum terjadinya krisis ekonomi di Indonesia.

Bila kondisi-kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat terjadi asal perbaikan infrastruktur yang mampu memperlancar arus produk masyarakat ke pasar dan pabrik dapat berjalan maka gairah ekonomi Riau Daratan tidak akan tertinggal dari wilayah lainnya. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6% bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai. Apalagi bila ekspor melalui pintu-pintu perdagangan internasional seperti Dumai, Bengkalis, dan Inhu makin dikembangkan secara terpadu dan profesional. Pelaku bisnis di Riau juga dapat bersandar pada makin terbukanya kran kredit perbankan untuk mendinamisir usahanya. Tetapi tentunya bukan dengan hanya berpangku tangan dan mengharapkan “susuan” dari pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

b. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



belaka. Diperlukan langkah-langkah yang strategis dan jaringan bisnis yang kuat, serta yang paling utama adalah mengedepankan mutu (*quality*) sebagai kompetensi untuk bersaing. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.